

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa ada kebergantungan dengan orang lain. Pendapat tersebut didukung dengan pernyataan Al Ghazali dalam H.A.R Tilaar yang menyatakan bahwa: terdapat dua hal yang menyebabkan mengapa manusia tidak dapat hidup sendiri. Pertama, karena manusia perlu bekerjasama untuk dapat melanjutkan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Kedua, manusia haruslah saling bekerjasama untuk saling menyediakan kebutuhan hidup yang esensial seperti pendidikan, sandang-pangan dan juga pekerjaan.¹

Berbicara tentang kebutuhan hidup esensial manusia, maka pendidikan merupakan salah satunya. Berbagai ilmu pengetahuan dapat dimiliki tentunya dengan menempuh jalan pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Kualitas sumber daya manusia dapat meningkat karena adanya kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pendidikan.

Pendidikan menurut Sugihartono berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan membentuk latihan.² Pendapat tersebut senada dengan pendapat Ki Hajar Dewantara dalam Dwi Siswoyo yang mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.

¹ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), Hal.152

² Sugihartono, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta : UNY Press, 2008), hal. 3

Artinya, pendidikan sebagai alat yang dijadikan tuntunan segala kodrat yang ada pada anak agar sebagai manusia muda dan juga sekaligus sebagai anggota masyarakat, dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Proses bagi seorang manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya yang dimaksudkan di atas, memerlukan pemeliharaan dan pelatihan dari manusia yang lebih dewasa, yaitu orang tua di lingkungan keluarga dan guru dalam pendidikan formal.³

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Kehadiran pendidikan membuat manusia akan berfikir mengenai tantangan zaman di era global. Selain itu, dengan pendidikan manusia dapat membangun hubungan baik antar sesamanya maupun lingkungannya. Sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik dengan pendidikan. Karena manusia akan memiliki bekal untuk menjalani kehidupannya pada zaman ini yang penuh dengan tantangan. Tidak berhenti disitu, pendidikan juga menyiapkan

³ Dwi Siswoyo, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : UNY Press, 2008), hal. 19

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pada http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf diakses pada 1 Februari 2018

generasi penerus bangsa agar mampu menjawab tantangan pada zaman yang akan datang.

Perkembangan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan, meskipun pada awalnya hanya sebatas peningkatan pada jenjang pendidikan saja. Menurut S. Nasution, pada zaman pemerintahan kolonial, pendidikan bagi anak-anak Indonesia hanya sebatas pendidikan rendah, kemudian berkembang, sehingga anak-anak Indonesia dapat mencapai pendidikan tinggi. Dewasa ini, pemerintah telah mencanangkan berbagai macam program dalam bidang pendidikan. Program-program tersebut memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan Indonesia, khususnya pada masa-masa krisis seperti sekarang ini.⁵

Upaya dalam menghadapi tantangan zaman, potensi dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Pendidikan formal memiliki peran penting dalam meningkatkan potensi ini melalui pembelajaran disetiap jenjangnya, yaitu dari jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pada pendidikan di perguruan tinggi. Semua ini secara sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia memenuhi hasrat mengembangkan kompetensi baik dalam ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan.⁶

Pendidikan yang berkualitas mampu membuat *input* yang biasa maupun telah bagus dapat dikembangkan dengan baik sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas dapat menyesuaikan arus perkembangan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

⁵ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: Bumi aksara, 2008), hal.1

⁶Kusaeri, *Acuan dan Teknik Penelitian Proses dan Hasil Belajar dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal.24

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Sesuai dengan aturan pemerintah, pendidikan memiliki fungsi dan tujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana yang terinci dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Berbicara perihal dunia pendidikan, lembaga sekolah merupakan institusi yang memiliki peran penting. Sekolah adalah sebuah lembaga tempat di mana terjadinya transfer pengetahuan serta pengembangan keterampilan peserta didik. Sekolah juga merupakan tindak lanjut proses pendidikan setelah anak mendapatkan pendidikan utama di lingkungan keluarga oleh orang tua. Melihat posisi lembaga sekolah yang penting dalam pendidikan anak, mutu sekolah menjadi pertimbangan tersendiri bagi orang tua untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya. Semakin tinggi mutu suatu sekolah, memungkinan

⁷ Moh. Soleh Hamid, *Standar Mutu Penilaian dalam Kelas*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), hal. 5

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pada http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf diakses pada 1 Februari 2018

semakin tinggi pula minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Tujuannya adalah agar anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, sehingga kemampuan dan keterampilannya dapat berkembang secara optimal.

Menurut Diana Townsend dan Butterwort dalam Samsulhadi ada sepuluh faktor yang ikut andil dalam keberhasilan pengelolaan sekolah yaitu: 1) kepemimpinan, 2) staf, 3) proses belajar mengajar, 4) pengembangan staf, 5) kurikulum, 6) tujuan dan harapan, 7) iklim sekolah, 8) penilaian diri, 9) komunikasi, dan 10) keterlibatan orang tua dan masyarakat.⁹ Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor keterlibatan orang tua dan masyarakat termasuk hal yang penting untuk diperhatikan sekolah.

Menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan dan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.¹⁰ Kehadiran komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua peserta didik, memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi berjalannya sekolah. Sehingga komite sekolah ikut berpartisipasi dalam keberhasilan pengelolaan sekolah.

Keikutsertaan komite sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan tentu perlu menjalankan perannya dengan baik. Menurut E. Mulyasa, peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai berikut: (1) Memberi

⁹ Samsulhadi, *Pembinaan Profesional Melalui Supervisi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru*, (Surabaya : PGRI Adibuana Surabaya, 2010), hal. 45

¹⁰ Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang *Komite Sekolah* pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf> diakses pada 1 Februari 2018

pertimbangan (*advisory agency*) dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan. (2) Mendukung (*supporting agency*), kerja sama sekolah dengan masyarakat, baik secara finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. (3) Mengontrol (*controlling agency*) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan *output*. (4) Mediator antara sekolah, eksekutif, legislatif, dengan masyarakat.¹¹ Keempat peran Komite Sekolah tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang sering terkait antara peran satu dengan peran yang lainnya.¹²

MIN 14 Blitar adalah salah satu madrasah yang telah mencetak banyak sekali generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan pembekalan moral dan akhlak serta ilmu pengetahuan oleh para pendidik yang kompeten yang mendukung sekali terciptanya insan yang beriman dan bertaqwa. MIN 14 Blitar merupakan salah satu madrasah yang unggul dalam bidang akademik mau pun non akademiknya. Meskipun sekolah ini belum lama berstatus sebagai madrasah negeri yaitu pada tahun 2009, namun dari segi prestasi madrasah ini juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah negeri lainnya. Madrasah ini juga tidak kalah diminati oleh para orang tua sebagai lembaga yang dipercaya untuk mendidik putra-putrinya. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah peserta didik yang mendaftar di madrasah ini

¹¹ Enco Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 189

¹² Sri Renani Pantjastuti, dkk, *Komite Sekolah : Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2008), hal. 86

setiap tahunnya. Jumlah total peserta didik MIN 14 Blitar pada tahun ajaran 2017/2018 adalah 297 orang. Selain secara kuantitas cukup banyak, madrasah ini juga memiliki kualitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari akreditasi madrasah yang memperoleh nilai A.¹³

Kualitas yang saat ini dimiliki oleh MIN 14 Blitar merupakan hasil kinerja berbagai pihak yang berkaitan dengan madrasah tersebut secara sinergis. Kepala madrasah, guru dan karyawan, peserta didik dan juga komite madrasah merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu madrasah tersebut. Kepala madrasah sebagai pemimpin bertugas mengawasi segala kegiatan yang berlangsung di madrasah. Hal tersebut dikemukakan oleh E. Mulyasa yang menyatakan sebagai berikut: kepala sekolah merupakan manajer di sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Dalam hal tersebut, maka sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntunan kebudayaan dan kebutuhan murid, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.¹⁴

Guru memiliki wewenang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik serta lingkungannya. Menurut Kunandar dalam melaksanakan tugas dan perannya,

¹³ Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MIN 14 Blitar, pada 20 September 2017.

¹⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 41

guru harus dapat menguasai kurikulum, menguasai substansi materi yang diajarkannya, menguasai metode dan evaluasi belajar, tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin dalam arti luas.¹⁵

Komite sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat dan orang tua siswa, memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi berjalannya sekolah. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah dalam Hasbullah adalah: (1) memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul kepala MIN 14

Blitar :

“Sebenarnya komite sudah terbentuk di MIN 14 Blitar dan sudah berjalan cukup baik. Contoh terbarunya adalah pembangunan mushola madrasah bagian utara. Dengan bantuan komite, madrasah dapat membangun mushola tersebut. Meski ada beberapa kendala di komite MIN 14 Blitar seperti pergantian pengurus komite yang masih belum menentu. Jika dilihat sesuai aturan, pergantian pengurus komite diadakan setiap 3 tahun sekali. Meskipun kepengurusan komite sudah berganti, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh kepengurusan baru. Karena dalam rencana jangka panjang pemindahan gedung madrasah secara keseluruhan akan menempati gedung sebelah utara. Realisasi wacana itu akan membutuhkan sinergi seluruh pihak yang terkait termasuk komite madrasah.¹⁷

¹⁵Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60

¹⁶Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 90

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul (Kepala MIN 14 Blitar) pada 17 Oktober 2017

Selama ini sebagian besar masyarakat masih berpandangan bahwa komite sekolah merupakan organisasi dalam sekolah yang beranggotakan perwakilan orang tua peserta didik dan bergerak dalam bidang finansial (dana) saja. Padahal komite tidak hanya itu tugas dan fungsinya. Komite sekolah memiliki wewenang untuk mengontrol pelaksanaan manajemen sekolah. Kontrol yang dimaksud tidak hanya sekadar penggunaan dana atau keuangan saja. Contohnya adalah berkaitan dengan meningkatkan efektivitas manajemen sekolah yang pada dasarnya ikut mengembangkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.

Sementara pada sebagian lembaga pendidikan, membentuk komite masih sebatas untuk memenuhi persyaratan yang ada. Idealnya, partisipasi komite sekolah adalah wadah bertemunya pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam rangka berkoordinasi mengenai perkembangan yang terjadi di dalam madrasah, baik yang berkaitan dengan peserta didik maupun hal-hal lain yang menyangkut kelangsungan lembaga. Bentuk realisasi partisipasi tersebut, komite madrasah dan pihak madrasah dapat mengadakan koordinasi secara rutin guna membahas perkembangan madrasah dan memperbaiki sistem serta kinerja yang dirasa kurang optimal.¹⁸

Permasalahan yang dihadapi komite sekolah selain dari persepsi masyarakat yang masih kurang tepat, juga terdapat pada anggota komite yang pada umumnya adalah warga masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam

¹⁸ Amiruddin Siahaan, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Ciputat: Quantum Teaching, 2006), hal 92-93

dunia pendidikan. Mereka merupakan orang-orang yang dianggap dapat diajak bicara tentang sekolah dan mungkin dapat mencari jalan keluar jika sekolah memerlukannya. Selain itu sebagian dari pengurus komite sekolah adalah orang-orang yang sibuk ditempat kerjanya masing-masing, sehingga waktu untuk memikirkan kemajuan sekolah sangat terbatas.¹⁹

Bukan suatu hal yang aneh jika ditemukan kenyataan bahwa pengurus komite sekolah memberikan rekomendasi atau menyetujui apa saja yang akan dilakukan kepala sekolah berkaitan dengan penggunaan dana sekolah. Masih ditemukan adanya pengurus komite sekolah yang tidak memahami manajemen pendidikan berbasis sekolah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penyelenggaraannya tidak dipahami, mereka beranggapan bahwa itu adalah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Adanya kesan bahwa sebagian masyarakat yang tergabung dalam komite tidak memahami pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa salah satu kelemahan dalam peran serta komite sekolah adalah yang belum utuh dalam memahami prinsip penyelenggaraan manajemen pendidikan berbasis sekolah.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka peran serta aktif komite madrasah sangat diperlukan dalam pengembangan mutu pendidikan disuatu lembaga pendidikan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“Partisipasi Komite Madrasah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di MIN 14 Kabupaten Blitar”*.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah partisipasi komite madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 Kabupaten Blitar. Dari fokus penelitian tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana partisipasi komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar ?
2. Bagaimana partisipasi komite madrasah sebagai badan pendukung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar ?
3. Bagaimana partisipasi komite madrasah sebagai badan pengontrol dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar ?
4. Bagaimana partisipasi komite madrasah sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Menindak lanjuti fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan partisipasi komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar.
2. Untuk medeskripsikan partisipasi komite madrasah sebagai badan pendukung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar.
3. Untuk memaparkan partisipasi komite madrasah sebagai badan pengontrol dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar.

4. Untuk medeskripsikan partisipasi komite madrasah sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik berkaitan dengan partisipasi komite sekolah dalam pengembangan mutu pendidikan di lembaga pendidikan umum maupun Islam, lembaga negeri maupun swasta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepala MIN 14 Blitar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepala madrasah untuk melibatkan komite madrasah dalam berbagai program yang dapat mengembangkan mutu pendidikan.

b. Bagi Komite MIN 14 Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada komite madrasah terkait dengan partisipasi di suatu lembaga pendidikan utamanya dalam pengembangan mutu pendidikan.

c. Bagi Guru MIN 14 Blitar.

1) Dengan dilaksanakan penelitian ini, guru dapat memberikan kontribusi positif bagi guru akan pentingnya partisipasi komite madrasah.

- 2) Memberi sumbangan pemikiran bagi para guru dan lembaga pendidikan pada umumnya tentang partisipasi komite madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan.

d. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan kepustakaan sebagai wujud keberhasilan belajar mengajar yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung serta untuk menambah literatur di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan partisipasi komite madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan.

e. Bagi peneliti selanjutnya atau pembaca.

- 1) Menambah pengetahuan yang dimiliki peneliti selanjutnya dan pembaca dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya menyangkut penelitian ini.
- 2) Dapat dijadikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang partisipasi komite madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah bertujuan agar sejak awal para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Partisipasi Komite Madrasah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di MIN 14 Kabupaten Blitar” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu peneliti perlu

memaparkan penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Partisipasi Komite Madrasah

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut.²¹ Komite Madrasah adalah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah²²

b. Pengembangan Mutu Pendidikan

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.²³ Mutu Pendidikan mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja suatu satuan pendidikan.²⁴

²¹ Suryosubroto, *Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat*, (Yogyakarta: FIP UNY, 2006), hal. 71

²² Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), Hal. 258

²³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, dalam <http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-18-2002.pdf> diakses 18 November 2017

²⁴ Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hal. 53

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Partisipasi Komite Madrasah dalam Pengembangan Mutu Pendidikan di MIN 14 Kabupaten Blitar” adalah keikutsertaan dari komite madrasah dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Kabupaten Blitar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menjalankan perannya sebagai komite madrasah guna meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti membagi dalam beberapa bab dan sub bab, agar mempermudah dalam memahami dan mengkaji skripsi ini. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian inti

- a. Bab I pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- b. Bab II kajian pustaka, berisi tentang kerangka teori penelitian, penelitian relevan dan paradigma penelitian.

- c. Bab III metode penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
 - d. Bab IV hasil penelitian, berisi tentang deskripsi subjek penelitian dan deskripsi data serta temuan penelitian.
 - e. Bab V adalah pembahasan, Pada bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian.
 - f. Bab VI Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
3. Bagian akhir

Terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.